

Rekrutmen CPNS

Semangat pemberantasan KKN (kolusi, Korupsi dan Nepotisme) semakin nyata ditegaskan untuk dihilangkan oleh pasangan Presiden dan Wapres yang baru, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Segala aspek yang berbau korupsi harus dikikis habis termasuk tatacara perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seperti pada saat penerimaan sebelumnya, perekrutan pegawai selalu dicurigai sebagai ladangnya korupsi orang-orang tertentu berupa uang sogok. Saat ini juga hantu sogok muncul seiring dengan kegiatan penerimaan CPNS yang secara nasional serentak dilakukan di seluruh kota di Indonesia.

Perekrutan CPNS saat ini memang agak berbeda dari perekrutan sebelumnya. Terlihat adanya keinginan Pemerintah untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas melalui perekrutan yang cukup ketat. Dari sekitar 4,5 juta peserta mengikuti seleksi untuk dapat mengisi hanya sekitar 200 ribu lowongan. Sistem seleksi yang ketat ini diharapkan akan menghasilkan CPNS yang handal, karena perekrutan awal seorang pegawai sangat menentukan masa depan yang bersangkutan. Artinya jika inputnya bagus maka akan menghasilkan output yang (diharapkan) bagus juga.

Ada yang perlu dicermati dari perekrutan CPNS sekarang ini, bahwa memiliki suatu pekerjaan di tengah gelombang pengangguran yang begitu tinggi adalah sebuah harapan. Sepertinya orang sudah tidak lagi peduli pekerjaan apa yang pantas bagi mereka, yang penting mereka memiliki pekerjaan dan menghasilkan uang, apapun namanya. Menjadi pegawai negeri merupakan harapan banyak orang, walaupun banyak tuduhan miring ditujukan pada mereka. Dan tuduhan miring itu yang kemudian dicoba untuk dihilangkan oleh pemerintah yang baru, melalui seleksi yang ketat.

Kalau perekrutan awal yang dilakukan dianggap akan dapat memperbaiki citra pegawai negeri, maka langkah ini harus didukung penuh dan yang paling penting adalah mendayagunakan mereka dengan semestinya setelah mereka diterima. Karena ke depan tantangan bagi kita akan semakin berat, dan kita memerlukan birokrat yang tangguh untuk menghadapinya.

Seiring dengan beratnya tantangan masa depan tersebut, kiranya pemerintah juga perlu memperbaiki sistem remunerasi PNS kita agar konsentrasi mereka terhadap pekerjaan menjadi semakin baik. Sudah saatnya penghargaan terhadap yang berprestasi dibudayakan. Dengan adanya perbaikan tersebut pemerintah dapat mencegah PNS bekerja di luar pekerjaan yang seharusnya. Jika mereka punya pekerjaan lain, harus dibatasi, misalnya sekian jam dalam seminggu. Jika mereka melanggar, mereka akan kena sanksi yang cukup berat. Artinya kerja keras PNS harus pula diikuti oleh baiknya kesejahteraan mereka sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban.

Perubahan memang selalu sulit untuk diterima, apalagi jika banyak pihak yang berkepentingan terusik dengan perubahan tersebut. Birokrasi kita juga bakal berubah? Harus, memang. (Dayat Hidayat).